



## Hubungan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi: di Provinsi Jawa Barat

Teguh Dwi Arsyah<sup>1</sup>

### **Abstract.**

*This study aims to analyze the effect of government expenditure in the education and health sectors on economic growth across 27 Regencies and Cities in West Java Province. West Java serves as a crucial research locus due to its status as the most populous province and a national industrial hub, despite experiencing economic fluctuations caused by the COVID-19 pandemic. The study utilizes panel data from 27 administrative regions spanning the period 2019 to 2025. The analytical method employed is panel data regression, with the Fixed Effect Model (FEM) selected as the best-fitting model. Statistical results indicate that government expenditure in the education sector has a significant effect on economic growth, as evidenced by a probability value of 0.0035 ( $< 0.05$ ). However, the negative coefficient suggests that in the short term, education spending acts as a fiscal burden or has not yet yielded immediate returns. Conversely, health sector expenditure does not significantly influence economic growth (probability value 0.4642  $> 0.05$ ). This is attributed to health allocations being predominantly curative and maintenance-oriented post-pandemic, thereby failing to generate a rapid multiplier effect. Simultaneously, the independent variables explain 18.6% of the variance in West Java's economic growth.*

**Keywords:** *Economic Growth, Education Expenditure, Health Expenditure, Panel Data, West Java.*

©2026 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

### **PENDAHULUAN**

Dalam perspektif makroekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) terbentuk dari empat komponen agregat utama, yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi sektor bisnis (I), kinerja ekspor neto (X-M), serta pengeluaran pemerintah (G) yang memegang peran vital sebagai stimulus fiskal Mankiw, (2018).

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, belanja pemerintah dialokasikan secara strategis untuk mengakselerasi pembangunan nasional demi mengejar ketertinggalan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi indikator kesuksesan pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai katalis yang meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan manusia Todaro & Smith, (2020)

\*Teguh Dwi Arsyah (✉)

-

Email: [-](#)

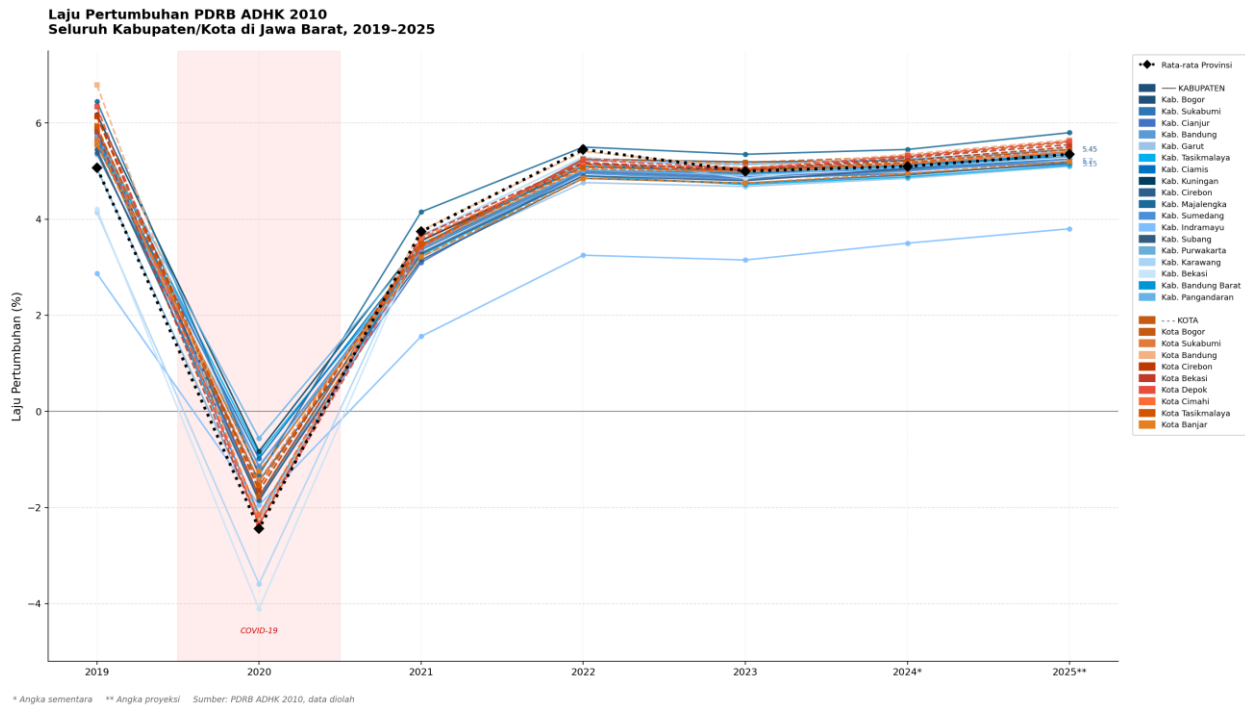


Variabel independen yang diuji dalam studi ini meliputi belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan. Berdasarkan perspektif makroekonomi Keynes, peran pemerintah sangat krusial dalam menstabilkan dan mengakselerasi perekonomian. Peningkatan pengeluaran publik diyakini akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, yang secara simultan meningkatkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi seberapa besar kontribusi parsial dari ketiga jenis pengeluaran tersebut dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi

Anggaran belanja pemerintah berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal vital untuk menstimulasi kesejahteraan sosial dan akselerasi ekonomi Musgrave & Musgrave, (1989). Alokasi strategis pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi produktif yang menentukan kualitas modal manusia dan efisiensi logistik suatu wilayah. Dalam konteks ini, Provinsi Jawa Barat menjadi locus penelitian yang sangat krusial. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar dan kontributor utama sektor manufaktur nasional, efektivitas belanja pemerintah di Jawa Barat memiliki dampak sistemik yang signifikan, tidak hanya bagi stabilitas ekonomi regional, tetapi juga terhadap agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan

Provinsi Jawa Barat adalah wilayah administratif strategis yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan Banten. Secara administratif, wilayah Jawa Barat terbagi ke dalam 27 daerah tingkat II, yang terdiri atas 18 Kabupaten dan 9 Kota (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023). Wilayah-wilayah ini mencakup pusat-pusat industri dan pemerintahan seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang, hingga daerah penyangga agraris dan pariwisata yang tersebar dari Kabupaten Bogor di utara hingga Kabupaten Pangandaran di Selatan.





**Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari Tahun 2019-2025 Data diolah**

Sumber BPS Provinsi Jawa Barat berbagai tahun

Jika melihat data PDRB dari tahun 2019 sampai prediksi 2025, ekonomi di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan pola pemulihan yang sangat jelas, ibarat huruf "V". Sempat jatuh dalam, lalu bangkit tinggi. Secara umum, ekonomi Jawa Barat yang awalnya stabil di angka 5,07% pada 2019, harus menerima pukulan berat saat pandemi 2020 hingga minus -2,44%. Tapi hebatnya, Jawa Barat bisa bangkit cepat. Pada tahun 2022, pertumbuhannya malah tembus 5,45%, lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Tren positif ini diperkirakan bakal terus stabil di kisaran 5% sampai tahun 2025.

Kalau kita bedah per wilayah, ternyata setiap daerah punya respons yang berbeda-beda tergantung apa sektor andalannya: Wilayah Industri (Bekasi & Karawang) Daerah ini ibarat "mesin" yang paling sensitif. Karena sangat bergantung pada pabrik dan ekspor, Bekasi dan Karawang kena dampak paling parah saat pandemi 2020 (minusnya sampai 4%). Gara-garanya sederhana: rantai pasok global macet dan pabrik tutup. Tapi, sifat industri itu cepat pulih. Begitu situasi normal, daerah ini langsung "ngebut" lagi dengan pertumbuhan di atas 5,2% pada 2022.



Wilayah Kota & Wisata (Bandung & Depok) Nasib serupa dialami kota besar. Karena mengandalkan orang jalan-jalan dan belanja, ekonomi Bandung dan Depok sempat anjlok saat ada pembatasan kegiatan. Namun, fenomena "balas dendam wisata" pasca-pandemi bikin ekonomi Bandung melonjak drastis di 2022. Ke depannya, adanya Kereta Cepat Whoosh dan LRT bikin prospek ekonomi di wilayah ini makin cerah.

Wilayah Pertanian Tasikmalaya, Pangandaran, Garut Sebaliknya, daerah di selatan Jawa Barat ini justru paling "tahan banting". Saat daerah industri minus besar-besaran, Pangandaran cuma turun sedikit sekali (-0,56%). Kenapa? Karena sektor pertanian dan pangan tetap jalan terus walau ada krisis. Bedanya, saat pemulihan, pertumbuhan mereka cenderung santai dan stabil, tidak meledak-ledak seperti daerah industri. Ada juga dua daerah yang unik. Indramayu pertumbuhannya cenderung paling pelan karena terlalu bergantung pada sektor Migas yang padat modal, bukan padat karya. Sementara itu, Majalengka justru jadi "bintang baru". Berkat adanya Bandara Kertajati dan kawasan industri baru, ekonomi Majalengka diprediksi bakal tumbuh paling kencang di tahun 2025.

Terdapat perdebatan akademis (*scholarly debate*) mengenai dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi seperti Maryaningsih (2014) dan Campodónico (2014) mendukung postulat Keynesian bahwa belanja pemerintah di sektor infrastruktur dan pendidikan menjadi stimulus positif pertumbuhan ekonomi. Namun, studi empiris lain memberikan hasil kontradiktif. Devarajan (1996) dan Laisina (2015) justru menemukan korelasi negatif pada sektor tertentu, yang diindikasikan terjadi akibat inefisiensi alokasi anggaran dan adanya jeda waktu (*time lag*) dampak investasi SDM. Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu ini mendorong peneliti untuk menguji kembali fenomena tersebut secara spesifik di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakteristik demografi dan industri yang unik

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disajikan terdapat beberapa perbedaan dengan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan ini, banyak yang meneliti tentang pengeluaran pemerintah sector pendidikan dan kesehatan, namun dalam penelitian yang dilakukan ini menambahkan keterbaharuan khususnya penambahan variabel dengan peneliti-peneliti sebelumnya dan lokasi penelitian yang menghususkan wilayah Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat



## TINJAUAN PUSTAKA

### Pembangunan Manusia

Menurut Amartya Sen (1999) dalam pendekatan kapabilitas (*Capability Approach*), pembangunan pada hakikatnya adalah proses memperluas kebebasan riil yang dinikmati manusia. Dalam pandangan ini, manusia diposisikan sebagai tujuan akhir pembangunan (*ends*), bukan sekadar alat produksi (*means*). Konsep ini menekankan pada dua aspek fundamental: pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan dan pengetahuan serta penciptaan peluang bagi manusia untuk memanfaatkan kemampuan tersebut dalam kehidupan ekonomi dan social.

### Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program kegiatan, seperti pembayaran gaji, subsidi, dan bantuan sosial. Sebaliknya, belanja langsung adalah pengeluaran yang melekat pada pelaksanaan program, yang terdiri dari belanja barang, jasa, dan modal (Mardiasmo, 2009). Selain klasifikasi tersebut, literatur keuangan publik juga mengenal pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin bersifat habis pakai untuk kelancaran administrasi pemerintahan, sedangkan belanja pembangunan bersifat investasi jangka panjang (*capital expenditure*) yang dampaknya dirasakan melalui peningkatan infrastruktur dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Suparmoko, 2002)

### Pertumbuhan Ekonomi

Secara teoritis, Boediono (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Definisi ini menekankan tiga aspek krusial: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Sebagai sebuah 'proses', pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan dinamis perekonomian suatu wilayah, bukan sekadar kondisi statis. Penekanan pada 'output per kapita' mengindikasikan bahwa pertumbuhan baru bermakna apabila laju kenaikan output melampaui laju pertumbuhan penduduk, yang secara langsung merefleksikan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, aspek 'jangka panjang' mensyaratkan adanya kecenderungan kenaikan yang berkelanjutan (*self-sustaining growth*), yang didorong oleh akumulasi modal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta adopsi teknologi yang meningkatkan produktivitas agregat



## Penelitian Terdahulu

Perdebatan akademis mengenai dampak fiskal terhadap ekonomi terbagi menjadi dua pandangan utama. Kelompok pertama menemukan kausalitas positif, berlandaskan argumen bahwa investasi kesehatan dan pendidikan meningkatkan akumulasi modal manusia. Hal ini dibuktikan oleh Baldacci et al. (2008) dan Mallick et al. (2016) di tingkat global, serta Arinta dan Endrawati (2019) di tingkat regional, yang menemukan bahwa belanja sosial secara signifikan memacu PDRB.

Di sisi lain, kelompok kedua menyoroti adanya anomali berupa hubungan negatif atau tidak signifikan. Devarajan et al. (1996) dan Pradhan (2011) berargumen bahwa inefisiensi anggaran dan kebocoran dana menyebabkan belanja publik menjadi beban pertumbuhan. Fenomena ini didukung oleh Hartwig (2010) melalui teori Baumol's cost disease pada sektor kesehatan, serta temuan empiris Laisina et al. (2015) dan Situmorang dan Munandar (2019) yang menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan dan kesehatan belum mampu memberikan daya dorong ekonomi yang nyata pada periode penelitian."

## METODOLOGI

Studi ini menganalisis determinan Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui tiga instrumen belanja publik, yaitu: Belanja Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), dan Dataset yang digunakan terbentuk dari 27 daerah tingkat II, yang terdiri atas 18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat selama periode 2019-2025. Untuk menguji hubungan antar variabel, penelitian ini menerapkan metode regresi data panel. Mengacu pada Baltagi (2005), data panel didefinisikan sebagai gabungan observasi pada beberapa unit individu (cross-section) yang diamati selama beberapa periode waktu (time series), yang memungkinkan analisis heterogenitas antarwilayah yang lebih presisi.

$$\ln Y_{it} = \ln \beta_0 + \ln \beta_1 \text{Pengeluaran Pend } X_1 \text{ }_{it} + \ln \beta_2 \text{Pengeluaran Kes } X_2 \text{ }_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Dimana :

- Y : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- $\ln \text{ Peng } X_1$  : Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan
- $\ln \text{ Peng } X_2$  : Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan
- $\text{Log} \beta_0$  : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2$  : Koefisien Variabel X
- i : Banyaknya Objek
- t : Banyaknya waktu



e : Error/ Residual

Analisis data dilakukan dengan metode *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Uji kriteria model menggunakan *Uji Chow* dan *Uji Hausman*. Uji statistik antara lain Uji t, Uji F, dan  $R^2$  untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun secara parsial (Sugiyono., 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Chow

**Tabel 4.1** Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.315786	(26,160)	0.0447
Cross-section Chi-square	86.622249	26	0.0808

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil Tabel 4.1 dapat disimpulkan hasil uji chow yang digunakan untuk analisis data panel, Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model Common Effect (CEM) atau *Fixed Effect* (FEM) yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel. Menurut Damodar Gujarati (2019) dan Baltagi (2003) prinsip dasar pengujian ini adalah membandingkan *Restricted Model* (Pooled OLS/Common Effect) dengan *Unrestricted Model* (Fixed Effect). Model yang digunakan adalah model FEM hal ini disebabkan oleh hasil Probability Cross Section F 0.0447 < dari 0.05 yang merupakan nilai alpha dalam penelitian tersebut hal ini menyebabkan model FEM yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.2** Hasil Regresi Data Panel Model FEM

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 02/05/26 Time: 09:43  
Sample: 2019 2025  
Periods included: 7  
Cross-sections included: 27  
Total panel (balanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------



C	1.443629	0.164039	8.800534	0.0000
X1	-0.062334	0.021060	-2.959839	0.0035
X2	0.019497	0.026573	0.733732	0.4642
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.402703	R-squared	0.186016	
Mean dependent var	1.406852	Adjusted R-squared	0.043569	
S.D. dependent var	0.447537	S.E. of regression	0.437679	
Akaike info criterion	1.325642	Sum squared resid	30.65002	
Schwarz criterion	1.823053	Log likelihood	-96.27315	
Hannan-Quinn criter.	1.527155	F-statistic	1.305859	
Durbin-Watson stat	2.243697	Prob(F-statistic)	0.155196	

Sumber Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil persamaan sebagai berikut

$$Y1 = 1.443629 + -0.062334X1 + 0.019497X2 + e1 \dots\dots\dots 4.1$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1.443629 berarti bahwa pengeluaran pemerintah sector pendidikan dan kesehatan konstan maka pertumbuhan ekonomi sebesar 1.443629 persen
2.  $X_1$  Merupakan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dihasilkan nilai coefficient - 0.062334 hal ini mengartikan apabila kenaikan 1 persen dana pendidikan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.062334. Sedangkan nilai probability 0.0035 < 0.05 atau nilai alpha hal ini menerangkan bahwa Pengeluaran Bidang Pendidikan Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
3.  $X_2$  Merupakan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dihasilkan nilai coefficient 0.019497 hal ini mengartikan apabila kenaikan 1 persen dana kesehatan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.019497. Sedangkan nilai probability 0.4642 > 0.05 atau nilai alpha hal ini menerangkan bahwa Pengeluaran Bidang Kesehatan tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi



4. Adapun nilai  $R^2$  sebesar 0.186016 hal ini mengidentifikasi bahwa 18 persen Variabel  $X_1$  dan  $X_2$  dapat menjelaskan Fenomena terhadap Y dalam hal ini pertumbuhan ekonomi sedangkan 82 persen dijelaskan variable lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini

## **Pembahasan**

### **Hubungan Pengeluaran Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Nilai probabilitas 0.0035 ( $<0.05$ ) memberikan bukti empiris yang kuat bahwa pengeluaran pendidikan adalah determinan krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini memvalidasi pandangan *Human Capital* (Schultz, 1961; Becker, 1964) bahwa anggaran pendidikan berfungsi sebagai investasi produktif, bukan sekadar biaya.

Relevansi teori tersebut sangat terasa di Jawa Barat rentang tahun 2019–2025. Meskipun sempat berkontraksi akibat pandemi, komitmen anggaran pendidikan sebesar 20% yang dimanifestasikan lewat perbaikan infrastruktur vokasi dan bantuan operasional telah berhasil mendongkrak kompetensi masyarakat. Indikatornya jelas: IPM Jawa Barat konsisten naik dari level 72,03 pada 2019 menjadi di atas 74 pada akhir periode pengamatan.

Peningkatan kapabilitas SDM ini menciptakan produktivitas marjinal yang tinggi, menarik realisasi investasi terbesar di Indonesia selama masa pemulihan (2021-2024). Sesuai dengan Teori Pertumbuhan Endogen Romer (1986), transformasi tenaga kerja terampil di sektor manufaktur inilah yang menjadi motor efisiensi, memicu *rebound* ekonomi daerah secara agregat

### **Hubungan Pengeluaran Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Nilai probabilitas sebesar 0.4642 menunjukkan bahwa hipotesis pengaruh belanja kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terbukti signifikan. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa karakteristik pengeluaran kesehatan di Jawa Barat selama periode 2019-2025 lebih bersifat pemeliharaan (*maintenance*) ketimbang pendorong produktivitas instan.

Sebagian besar alokasi anggaran terserap untuk layanan kuratif dan operasional fasilitas kesehatan, terutama saat menghadapi guncangan pandemi. Sesuai dengan pandangan Mayer (2001), belanja yang didominasi oleh sifat kuratif cenderung tidak memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) yang cepat terhadap ekonomi makro. Selain itu, adanya inefisiensi alokasi di masa krisis menyebabkan transmisi anggaran ke sektor riil menjadi terhambat, sehingga kenaikan belanja kesehatan tidak serta-merta diikuti oleh lonjakan pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama



## SIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan model *Fixed Effect* mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2019–2025, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Pengeluaran Pendidikan:

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan oleh nilai probabilitas 0.0035 ( $< 0.05$ ). Secara empiris, temuan ini mengonfirmasi Teori *Human Capital*, di mana alokasi anggaran pendidikan di Jawa Barat berfungsi sebagai investasi vital yang menentukan kualitas modal manusia. Meskipun secara statistik koefisien menunjukkan arah negatif (yang mengindikasikan adanya jeda waktu/*time lag* investasi atau beban anggaran jangka pendek), namun secara substansi, komitmen anggaran pendidikan (termasuk BOPD dan infrastruktur vokasi) telah berhasil menjaga kualitas SDM. Hal ini terlihat dari peningkatan IPM secara konsisten yang menjadi fondasi bagi resiliensi ekonomi dan daya tarik investasi di kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang.

#### 2. Pengaruh Pengeluaran Kesehatan:

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai probabilitas 0.4642 ( $> 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa selama periode pengamatan (2019–2025), belanja kesehatan di Jawa Barat lebih bersifat *defensive expenditure* atau pengeluaran untuk bertahan, khususnya dalam merespons pandemi COVID-19. Anggaran lebih banyak terserap untuk layanan kuratif (penyembuhan) dan operasional, yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) rendah terhadap output ekonomi makro, dibandingkan jika anggaran tersebut dialokasikan untuk program preventif atau infrastruktur kesehatan jangka panjang.

#### 3. Kemampuan Model (Determinan Lain):

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.1860 menunjukkan bahwa variabel belanja pendidikan dan kesehatan hanya mampu menjelaskan sekitar 18,60% variasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Sisanya sebesar 81,40% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti investasi swasta, infrastruktur fisik, dan konsumsi rumah tangga juga memegang peranan dominan dalam membentuk struktur ekonomi wilayah.



## Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan dan saran akademis sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Efisiensi Belanja Pendidikan (Link and Match): Mengingat pengaruhnya yang signifikan namun memiliki tantangan dalam koefisien, pemerintah daerah disarankan untuk tidak hanya fokus pada *kuantitas* anggaran (pemenuhan 20%), tetapi pada *kualitas* belanja. Alokasi harus diprioritaskan pada pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri di kawasan strategis (seperti Rebana Metropolitan), sehingga lulusan dapat langsung terserap pasar kerja dan mendorong produktivitas tanpa jeda waktu yang lama.

Transformasi Belanja Kesehatan: Agar belanja kesehatan berdampak pada ekonomi, pemerintah perlu menggeser fokus dari paradigma *kuratif* (pengobatan) menjadi *promotif dan preventif*. Investasi pada perbaikan gizi (penanganan stunting), sanitasi lingkungan, dan kesehatan kerja akan menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif dalam jangka panjang, sehingga anggaran kesehatan tidak habis hanya sebagai biaya operasional rumah sakit.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penambahan Variabel: Mengingat nilai  $R^2$  yang relatif kecil (18,6%), peneliti selanjutnya sangat disarankan untuk menambahkan variabel makroekonomi lain yang potensial, seperti Belanja Infrastruktur, Investasi (PMDN/PMA), atau Tenaga Kerja.

Perluasan Periode Waktu: Mengingat investasi pendidikan dan kesehatan memiliki karakteristik *time lag* (dampak tertunda), penelitian di masa depan disarankan memperpanjang rentang waktu pengamatan (misalnya >10 tahun) untuk dapat menangkap dampak jangka panjang dari peningkatan kualitas SDM terhadap pertumbuhan ekonomi secara lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Y. N., & Endrawati, T. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 55–66. <https://doi.org/10.22219/jep.v17i1.9564>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2023). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023*. BPS Jawa Barat.



- Baldacci, E., Clements, B., Gupta, S., & Cui, Q. (2008). Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries. *World Development*, 36(8), 1317–1341. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.08.003>
- Baltagi: Baltagi, B. H. (2013). *Econometric analysis of panel data* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Boediono. (2013). *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*. Yogyakarta: BPF.
- Campodónico, J., & Baca, J. (2014). *Impacto del Gasto Público Social en el Crecimiento Económico y la Reducción de la Pobreza*. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. F. (1996). The Composition of Public Expenditure and Economic Growth. *Journal of Monetary Economics*, 37(2), 313–344. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(96\)01249-4](https://doi.org/10.1016/0304-3932(96)01249-4)
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. F. (1996). The Composition of Public Expenditure and Economic Growth. *Journal of Monetary Economics*, 37(2), 313–344. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(96\)01249-4](https://doi.org/10.1016/0304-3932(96)01249-4)
- Gujarati: Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Hartwig, J. (2010). Is Health Capital Formation Good for Long-Term Economic Growth? Panel Granger-Causality Evidence for OECD Countries. *Journal of Macroeconomics*, 32(1), 314–325. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2009.06.003>
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Laisina, J. K., Masinambow, V. A., & Siwu, H. F. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 1–12.
- Laisina, J. K., Masinambow, V. A., & Siwu, H. F. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 1–12.
- Mallick, L., Das, P. K., & Pradhan, K. C. (2016). Impact of Educational Expenditure on Economic Growth in Major Asian Countries. *International Journal of Social Economics*, 43(11), 1121–1140. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2015-0158>
- Mankiw, N. G. (2018). *Macroeconomics* (10th ed.). New York: Worth Publishers.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, N. (2014). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 17(1), 61–98. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i1.444>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill. (Ini adalah buku "kitab suci" untuk teori pengeluaran pemerintah/keuangan negara).
- Pradhan, R. P. (2011). The Granger Causality between Public Spending on Social Infrastructure and Economic Growth in India. *Journal of Finance and Economics*, 3(4), 16–35.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Situmorang, B., & Munandar, A. I. (2019). Analisis Belanja Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–14.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi ke-3). Jakarta: RajaGrafindo Persada.



- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Harlow: Pearson Education.

